

Media Cetak	Koran Sindo
Tanggal	Senin 3 Februari 2025
Wilayah	Kota Makassar



Penganggaran PBI-JK Tunggu Data Hasil Validasi

JAMINAN KESEHATAN

Penganggaran PBI-JK Tunggu Data Hasil Validasi

MAKASSAR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar masih menunggu data Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyiapkan anggaran program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK). Ini diutarakan Kepala Dinkes Makassar Nursaidah Sirajuddin.

"Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)," ujarnya, kemarin.

"Kami berdasarkan data dari Dinsos, kemudian dari Dinsos sudah ada tahun lalu tapi saya tidak tahu di DPA untuk tahun ini karena belum terbit," sambungnya.

Nursaidah menegaskan, peserta penerima program PBI-JK harus melalui verifikasi data dari Dinsos agar penerima tepat sasaran.

"Validasi data diperkuat oleh Dinsos dan Dinkes yang membayarkan. Kalau semisal data dari Dinsos itu ada 10, pasti itu saya lebihkan anggarannya karena kita tidak tahu dalam setiap tahun jangan sampai ada yang bertambah," katanya saat dihubungi.

Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinsos Kota Makassar, Andi Rahmat Mappatoba menjelaskan PBI terbagi dua yakni PBI-JK dan BPPU BP Pemda.

"Untuk penganggarnya itu di Dinkes, kalau Dinsos terkait dengan pengusulan datanya. Jadi PBI itu ada dua yakni PBI-JK melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPBU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah yang anggarannya lewat APBD," terangnya saat dihubungi.

"Jadi basisnya ini per individu, bukan per kepala keluarga untuk diberikan jaminan kesehatannya dari pemerintah," sambungnya.

Mantan Lurah Panatikang, Kota Makassar ini mengatakan sudah ada aturan pembagian pembayaran program PBI dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kota.

"Kalau PBI APBD pembagian anggarannya ada lewat provinsi dan melalui kota, jadi pembagian anggarannya untuk Kota Makassar perbandingannya 80/20," kata Rahmat.

"Jadi 80 persen ditanggung oleh APBD kota dan 20 persen sisanya ditanggung dari APBD provinsi,"

lanjutnya.

Rahmat sapaan karibnya mengatakan, pendafatar PBI setiap bulan pasti berubah. Hal tersebut dikarenakan ada masyarakat yang sudah meninggal, pindah kependudukan, dan sudah mendapatkan pekerjaan yang masuk ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang telah dijamin oleh perusahaan.

"Bagaimana betul-betul PBI ini harus menyentuh, PBI-JK sasarannya yakni yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), itu dimaksimalkan pemadannya," terangnya.

Pria kelahiran 1979 ini menuturkan bahwa Dinsos Makassar bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) penerima PBI-JK berdasarkan verifikasi dari Kementerian Sosial (Kemensos)



Saya belum lihat anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dimasukkan dari Dinsos, berapa data yang disodorkan dari Dinsos dan segitu anggarannya kami (Dinkes Makassar)."

NURSAIDAH SIRAJUDDIN
Kepala Dinkes Makassar

"Di Makassar itu setiap bulan kita rekonsiliasi dengan BPJS. Kalau PBI-JK tarikan datanya lewat Kemensos yang menentukan bagi penerima PBI. Jadi pengusulannya lewat kita (Dinsos) kemudian validasi dan verifikasi itu lewat Kemensos," tuturnya saat dihubungi.

"Tergantung kuota yang disediakan oleh Kemensos, selebihnya dari itu kalau ada memang yang tidak terdaftar melalui APBN itu bisa disupport melalui APBD," sambungnya.

Rahmat menyebut ada juga peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPBU) dan Bukan Pekerja (BP) pemerintah daerah dan sasarannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia juga sudah melakukan pemadanan secara keseluruhan dan sudah menindak lanjut program itu.

Adapun jumlah pendafatar PBI-JK periode pada bulan Desember 2024 sebanyak 293.336 Peserta dan 683 Bayi Baru Lahir (BBL) dan PBPBU BP pemda periode bulan Januari 2025 sebanyak 200.051 peserta.

□dewan ghyats yan